

AWAM POLITIS DAN TUGAS KRITIS-PROFETIS

Dismas Kwirinus

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Abstrak

Fokus tulisan ini menjelaskan tentang awam politis dan tugas kritis-profetis. Politik merupakan bidang yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Politik merupakan kunci sukses peletakan landasan bagi persyaratan tercapainya pengembangan martabat pribadi manusia melalui berbagai struktur pemenuhan fasilitas kehidupan umum. Bidang politik bisa menjadi sarana Gereja mewujudkan imannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Antara Gereja dan politik tidak ada kaitannya secara langsung namun begitu juga politik bukan suatu bidang yang harus dijauhi. Justru iman mempunyai dimensi politik. Keterlibatan Gereja dalam bidang politik adalah bagian integral dari tugas profetisnya di dunia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui bentuk dialog Gereja dan kaum awam dalam bidang politik. Penulis menggunakan metodologi analisis fenomenologis. Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu: pembacaan kritis atas teks dan pengamatan. Adapun temuan dalam penelitian ini, bahwa Gereja terlibat dalam politik harus dimengerti bukan sebagai institusi. Gereja sebagai institusi tidak terlibat politik praktis yang seringkali dimengerti sebagai kekuasaan dan keterikatan pada suatu partai politik. Gereja tidak berkompetisi dalam bidang politik prakti. Keterlibatan Gereja dalam bidang politik hanya sejauh menyampaikan penilaian moralnya, juga tentang hal-hal yang menyangkut tata politik. Jika dikatakan Gereja terlibat dalam politik harus dimengerti secara luas. Kaum awamlah yang terlibat dalam politik praktis.

Kata Kunci: Awam, Gereja, Politik, Profetis, Tugas Kritis

PENDAHULUAN

Semua warga negara mempunyai tanggung jawab untuk membangun sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keterlibatan warga negara bisa dalam berbagai bidang dan bentuk, misalnya: sosial, ekonomi, budaya dan politik.¹ Namun dalam tulisan ini penulis hanya membahas keterlibatan umat Katolik sebagai bagian dari

¹ A. Darung, & Yuda, Y. (2021). Keterlibatan Gereja Katolik Mendukung Moderasi Beragama Berorientasi Pada Komitmen Kebangsaan. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 5(2), hlm. 84

rakyat Indonesia dalam bidang politik, awam politis dan tugas kritis-profetisnya. Hal ini jelas berhubungan dengan tahun 2023-2024 di mana tahun ini merupakan tahun politik dan banyak calon anggota legislatif yang bermunculan berasal dari kalangan Katolik. Dalam bidang politik pun penulis tidak membahas secara panjang lebar segala aspek politik. Penulis secara khusus lagi menelaah peran politikus awam dan tugas kritis-profetisnya. Lewat tulisan ini penulis hanya ingin menyampaikan bahwa umat Katolik mempunyai tanggung jawab untuk membentuk Negara Indonesia menjadi lebih baik. Bentuk tanggung jawab yang penulis ungkapkan di sini adalah membangun gerakan moral lewat keterlibatan mereka dalam bidang politik. Hal ini ditegaskan dalam *Gaudium et Spes*, art. 75 bahwa: “Hendaknya segenap umat kristen menyadari panggilan mereka yang khas dalam negara. Di situlah harus terpancar teladan mereka, yang terikat oleh kesadaran akan kewajiban mereka mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum yang memang perlu ditingkatkan”.²

Alasan penulis memilih bidang politik karena di bidang-bidang tata duniawi, politik merupakan bidang yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Politik merupakan kunci utama peletakkan landasan bagi persyaratan tercapainya pengembangan martabat pribadi manusia melalui berbagai struktur pemenuhan fasilitas kehidupan umum. Politik merupakan sarana Gereja dan umat Katolik untuk mengekspresikan imannya serta hidup dalam kepenuhan martabat gerejaninya.³ Keterlibatan Gereja dalam bidang politik ini merupakan bagian integral dari tugas perutusannya di dunia. Gereja ada di dunia bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani.⁴

Dalam tulisan ini Gereja terlibat dalam politik harus dimengerti bukan sebagai institusi. Gereja sebagai institusi tidak terlibat politik praktis yang seringkali dimengerti sebagai kekuasaan dan keterikatan pada suatu partai politik. Gereja tidak berkompetisi dalam bidang politik prakti.⁵ Keterlibatan Gereja dalam bidang politik hanya sejauh menyampaikan “penilaian moralnya, juga tentang hal-hal yang menyangkut tata politik”.⁶

² *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 75

³ Donatus Sarmada Kelen, (2018). Gereja Katolik Indonesia di Tengah Pusaran Politik Kekuasaan dan Tantangannya Ke Depan. *Studia Philosophica et Theologica*, 18(2), hlm. 90

⁴ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 3

⁵ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 42

⁶ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 76

Jika dikatakan Gereja terlibat dalam politik harus dimengerti secara luas. Kaum awam yang terlibat dalam politik praktis.⁷ Namun begitu keterlibatan mereka tidak pernah mewakili Gereja. Keterlibatan kaum awam dalam politik atas nama dan tanggung jawab mereka sendiri.⁸ Hanya saja dalam keterlibatannya tersebut kaum awam harus “memainkan peranan aktif, tidak hanya wajib meresapi dunia dengan semangat kristiani, melainkan dipanggil juga untuk dalam segalanya menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat manusia”.⁹

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Penulis berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literatur menjadi sebuah kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Karena akan menganalisis kumpulan temuan literatur, maka data yang akan digunakan sekaligus penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka. Secara lebih tegas, penelitian pustaka dan pembacaan kritis atas teks dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan teori-teori politik, buku-buku, jurnal dan dokumen yang memiliki kaitan erat, baik secara substansial maupun sekadar pelengkap data, dengan pembahasan yang tentunya disesuaikan berdasarkan pilihan tema yang menjadi konsentrasi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa hal yang kiranya mendesak untuk dilaksanakan Gereja antara lain membangun gerakan moral di segala bidang terutama bidang politik dan membangun persaudaraan sejati di tengah masyarakat yang pluralis.¹⁰ Dua hal tersebut merupakan tantangan Gereja Indonesia untuk mewujudkan imannya di tengah masyarakat, mengingat Gereja Katolik hanyalah minoritas. Berbicara mayoritas dan minoritas kiranya Gereja Katolik di Indonesia akan tetap menjadi minoritas. Namun, perjuangan Gereja tidak boleh berhenti hanya karena menjadi golongan minoritas di

⁷ Yohanes Maryono, (2012). Keterlibatan Gereja Katolik Indonesia Dalam Bidang Politik. *Jurnal Teologi*, 1(2), hlm. 103

⁸ Avery Dulles, *Model-Model Gereja* (Nusa Indah: Ende, 1990), hlm. 27

⁹ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 43

¹⁰ Marius Omyair, (2022). Partisipasi Gereja Katolik Dalam Reformasi Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Logos*, 2(1), hlm. 33

tengah-tengah mayoritas Islam. Justru di sinilah nampak peran Gereja sebagai garam dan terang dunia. Komunitas Yesus sendiri adalah minoritas di antara mayoritas Yahudi.¹¹ Namun justru komunitas Yesus mampu memberi warna perubahan nilai-nilai dalam masyarakat Yahudi. Yesus memberi warna baru dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, yaitu Cinta Kasih. “Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu” dan “Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri”.

1. Minoritas dan Marginalitas Umat Katolik

Ada pepatah mengatakan, “*small is beautiful*”: “kecil itu indah”. Pepatah ini mau mengatakan bahwa apa yang kecil dan sederhana itu belum tentu buruk. Adakalanya justru dari yang kecil itu muncul sesuatu yang sangat bernilai, bermanfaat dan berguna. Dalam Kitab Suci banyak kali digunakan gambaran: yang kecil berhasil mengalahkan yang besar. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah Raja Daud mampu mengalahkan singa, kemudian Daud berhasil mengalahkan Goliat, si raksasa dari Filistin (1 Sam 17). Namun seringkali orang atau kelompok kecil mempunyai beberapa kecenderungan: rendah diri, sombong, dan minta diperhatikan.

Pada kecenderungan pertama, kelompok minoritas akan merasa rendah diri. Mereka akan selalu merasa dirinya tidak berharga di mata orang lain. Mereka selalu mengeluh dan takut tidak diterima oleh orang lain. Kelompok minoritas akan berusaha mencari figur yang kuat tempatnya menggantungkan diri. Dia akan merasa aman jika berada di belakang figur tersebut. Maka dari itu kelompok minoritas biasanya diam saja jika terjadi pelanggaran nilai-nilai etis oleh kelompok mayoritas. Keadaan demikian itu bisa menimbulkan krisis identitas. Jika terjadi krisis identitas dan merasa terancam maka kelompok minoritas akan lari kepada kekuasaan. Akibatnya Gereja lama-kelamaan bungkam terhadap praktik-praktik kesewenangan-wenangan penguasa terhadap kaum kecil. Gereja menjadi apatis terhadap situasi sosial kongkrit. Tujuan Gereja “merangkul” kekuasaan adalah agar dapat berhadapan dengan Islam.¹²

¹¹ Wijaya Y., (2018). Kepemimpinan Yesus Sebagai Acuan Bagi Kepemimpinan Gereja Masa Kini. *Jurnal Jaffray*, 16(2), hlm. 129. <https://doi.org/10.25278/jj71.v16i2.287>

¹² Mateus Mali, *Konsep Berpolitik Orang Kristiani* (Kanisius: Yogyakarta, 2014), hlm. 34.

Kecenderungan lain dari minoritas adalah menjadi sombong. Karena merasa diri menjadi garam, terang, dan ragi dunia, maka memandang diri sendiri hebat. Kesombongan akan membuat minoritas menjadi eksklusif dan terpisah dari yang lain. Selain kedua hal di atas di kalangan warga Gereja yang minoritas ini, ada pendapat bahwa kepentingan Gereja kurang diperhatikan selama Orde Baru. Orang-orang kristiani cukup mendapat tekanan baik di birokrasi pemerintahan. Apakah betul demikian keadaannya?

Dilihat dari fakta sejarah, pada awal Orde Baru rezim Soeharto cukup dekat dengan beberapa tokoh Katolik. Bisa dikatakan orang-orang Katolik mendapat perlakuan yang istimewa pada saat itu. Kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh Katolik tersebut membuat tidak senang banyak orang di kalangan mayoritas Islam.¹³ Pada akhir rezim Soeharto (sejak Pemilu 1992 dan lebih-lebih pada hasil Pemilu 1997) memang orang-orang Katolik mulai tersingkir dari panggung politik nasional. Kecemasan mulai nampak di antara berbagai kalangan Katolik. Tersingkirnya satu dua orang Katolik dalam pemerintahan pusat seringkali dipandang tersingkirnya atau proses marginalisasi orang Katolik secara keseluruhan.¹⁴

Kehadiran orang-orang Katolik dalam percaturan politik nasional tidak pernah mewakili Gereja. Orang-orang Katolik yang terpilih menjadi menteri Kabinet Pembangunan dan pejabat-pejabat pemerintah lainnya tidak pernah menjadi wakil Gereja atau umat Katolik.¹⁵ Sebab Gereja tidak berkompetisi dalam politik praktis. Karena itu tersingkirnya beberapa orang Katolik dalam kabinet misalnya, tidak boleh dipandang sebagai tersingkirnya orang Katolik secara keseluruhan.

Dalam usahanya menjadi tanda dan sarana keselamatan di dunia ini memang kadangkala Gereja terjebak ke dalam sifat egonya. Gereja kadangkala arogan menganggap dirinya paling hebat sehingga harus ada orang Katolik dalam pemerintahan. Padahal apakah kalau ada banyak orang Katolik yang menjadi menteri lalu negara Indonesia akan menjadi lebih sejahtera? Bisa jadi orang Katolik yang menjadi pejabat negara akan lebih korup dan rendah moralnya dari yang bukan Katolik.

¹³ Syamsudin Haris, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru* (Gramedia: Jakarta, 1996), hlm. 17

¹⁴ Syamsudin Haris, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, hlm. 18

¹⁵ Piet Go, *Peran Serta Orang Katolik dalam Politik* (Dioma: Malang, 1990), hlm. 29

Gereja Katolik dalam usahanya menumbuhkan Kerajaan Tuhan di dunia ini tidak semestinya Gereja berpikiran sempit dan sektarian. Akan lebih baik jika Gereja mencetak dan menghasilkan orang-orang yang mau berjuang demi masyarakat tanpa pamrih seperti Mgr. A. Soegijapranata, I. Slamet Riyadi, Yos Sudarso, Adisucipta, I.J. Kasimo, Mgr. Belo, Rm. Sandyawan, Rm. Mangun, Bambang Warih Koesoema, Pius Lustrilanang. Gereja harusnya risau akan sedikitnya jumlah warga Katolik yang seperti mereka. Bukankah komitmen Gereja adalah menjadi garam, terang dan ragi dunia?

Gereja untuk dapat menjadi garam, dan terang dunia haruslah membangun diri sendiri terlebih dahulu dengan dasar-dasar yang kuat. Dalam hal ini baik awam maupun kaum religiusnya sama-sama harus mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Dengan pembentukan kualitas pribadi yang berlandaskan nilai-nilai kristiani, profesi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman umat Katolik harus lebih asin dan bercahaya pada dunia sekitarnya. Kaum religius dan awam harus benar-benar menyadari bahwa dirinya dipanggil bukan untuk dilayani dunia tapi justru untuk melayani dunia.¹⁶ Gereja harus angkat bicara demi kepentingan semua orang (bukan saja demi kepentingan orang Kristen) untuk melibatkan semua orang yang berkehendak baik (bukan saja orang Katolik) dalam perjuangan demi martabat manusia.¹⁷

Sebagai warga Gereja dan sekaligus warga negara Indonesia maka umat Katolik wajib turut secara aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan bangsa (bdk. GS. 24). Bersama-sama dengan umat-umat yang lain, umat Katolik mempunyai kewajiban yang sama dalam menyusun dan mengembangkan masyarakat.¹⁸ Untuk itu Gereja harus turut aktif di dalam rupa-rupa bidang kehidupan masyarakat: sosial, ekonomi, politik. Gereja bukanlah gudang kesucian yang menyelamatkan dunia yang jahat lewat pengarahannya serta ajaran dan rahmat sakramental. Gereja menyucikan dunia lewat keterlibatan dan pergulatan para anggotanya dengan masalah-masalah sosial. Di tengah-tengah perjuangan tersebutlah Gereja akan menemukan wujud iman yang aktual dan keselamatan nyata.

¹⁶ Piet Go, *Peran Serta Orang Katolik dalam Politik*, hlm. 30

¹⁷ Piet Go, *Etos dan Moralitas Politik* (Kanisius: Yogyakarta, 2004), hlm. 16

¹⁸ Piet Go, *Etos dan Moralitas Politik*, hlm. 18

Apa yang dapat disumbangkan Gereja pada bidang-bidang kemasyarakatan? Gereja Katolik tidak mempunyai konsep pemecahan masalah dalam bidang-bidang tersebut yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sumbangan yang khas dari Gereja adalah segi etis yang melekat pada permasalahan tersebut yang diwarnai oleh nilai-nilai Kristiani, misalnya: menolak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), berpolitik secara ‘fair play’, membangun persaudaraan sejati dengan umat beragama lain. Gereja bertindak membuat baik negara dan bangsa Indonesia lewat gerakan moral di segala bidang.¹⁹

Gereja Katolik memang minoritas. Namun biarpun minoritas Gereja tetap harus memperjuangkan kesejahteraan umum. Apa yang dilakukan oleh Gereja mungkin akan terlihat kecil. Namun jika pelaksanaannya perjuangan itu dilandasi oleh nilai-nilai kristiani dan Pancasila maka tindakan-tindakan etis Gereja akan menjadi mata rantai usaha perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika mata rantai tersebut dirangkaikan dengan mata rantai yang lain (dari kelompok agama yang lain) dari hari ke hari tentulah akan terbentuk rantai yang kokoh. Rantai kokoh nan kuat tersebut akan dapat digunakan untuk menarik bangsa Indonesia dari kebobrokan moral yang terjadi saat ini.

Gereja tidak perlu bermimpi akan dapat mengubah wajah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Kebobrokan moral di segala bidang adalah akibat dari dosa-dosa manusia. Apa yang terjadi tetaplah terjadi. Tidak ada seorang pun dapat merubah apa yang telah terjadi. Hal yang dapat Gereja lakukan adalah mengusahakan manusianya agar tidak berbuat dosa lagi.²⁰

2. Gereja dan Politik

Peran gembala umat untuk dapat mendorong umatnya agar aktif terlibat dalam usaha membangun kehidupan bermasyarakat pertama-tama harus memiliki kepekaan sosial dan menyadari akan tanggung jawab sosial politik sebagai pastor atau gembala umat dan warga negara.²¹ Pastor yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab politik akan mampu mendidik iman umatnya agar berdimensi politik. Memang para imam dan biarawan-

¹⁹ Eduard R. Dopo, *Keprihatinan Sosial Gereja* (Kanisius: Yogyakarta, 1992), hlm. 29

²⁰ Eduard R. Dopo, *Keprihatinan Sosial Gereja*, hlm. 32

²¹ Eduard R. Dopo, *Keprihatinan Sosial Gereja*, hlm. 34

biarawati tidak dapat terlibat dalam politik praktis namun demikian mereka hendaknya mengikuti berbagai dinamika dalam dunia politik, sehingga menjadi bagian seluruh gerakan kemasyarakatan. Sebagai warga negara yang baik mereka harus mencintai negaranya dan karena itu juga mempunyai minat dalam masing-masing politik.

2.1. Politik

Menurut Miriam Budiardjo ada berbagai macam definisi mengenai politik dalam kepustakaan ilmu politik. Namun pada umumnya politik didefinisikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.²² Dalam perkembangan ilmu politik sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik.

Pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kepentingan bersama.²³ Dalam hal ini berarti bahwa politik selalu terkait erat dengan tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Maka tekanan dari pandangan politik yang pertama ini adalah “apa yang seharusnya” dicapai demi kebaikan bersama seluruh warga negara polis dan “dengan cara apa sebaliknya” tujuan-tujuan tersebut dicapai.

Kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah.²⁴ Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Dalam penyelenggaraan penertiban tersebut negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya. Kalau perlu negara bisa menggunakan kekerasan fisik terhadap warganya untuk memaksakan kehendaknya. Kekuasaan yang besar tersebut memang harus dimiliki oleh negara karena keberadaan negara adalah untuk memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.”²⁵ Pihak penyelenggara adalah membuat dan melaksanakan kebijakan umum.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia: Jakarta, 1996), hlm.61

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, Jakarta, 1992), hlm. 76

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 64

²⁵ Arief Budiman, *Teori Negara* (Gramedia: Jakarta, 1996), hlm. 24

Ketga, politik adalah segala kegiatan yang diarahkan kepada usaha untuk mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. “Kekuasaan” adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok yang lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.²⁶

Keempat, politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku politik baik perorangan maupun kelompok dalam memilih tujuan-tujuan dari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kebijaksanaan umum menurut Hoogerwerf adalah “membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan”.²⁷

Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.²⁸ Konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam masyarakat termasuk dalam proses politik. Karena itu perlu ditekankan di sini pentingnya praktik politik yang banyak berdialog bahkan perdebatan sekalipun. Dalam proses dialog tersebut tesis akan mendapat anti tesisnya. Lewat tesis dan anti tesis tersebut maka akan dimungkinkan tercapainya suatu sintesis yang lebih benar dari pada semula.

Dari uraian tersebut di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha pencapaian kesejahteraan umum antar masing-masing anggota kelompok atau masyarakat agar hidup bersama menjadi lebih baik, damai saling menghormati sebagai manusia.²⁹ Secara individu, politik kesejahteraan yang berbasis hati nurani dan budi yang jernih menjadi ungkapan nyata. Karena dengan hati nurani dan budi yang jernih segala macam bentuk konflik dan intrik kekuasaan ditimbang dan diputuskan. Politik yang dilandasi oleh moralitas, etika, fair play akan menghargai dan melindungi hak-hak azasi setiap manusia entah individu maupun sebagai komunitas. Politik tidak untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Usaha tersebut melibatkan semua warga masyarakat bukan hanya para elit.

2.2. Berpolitik dan Berpolitik Praktis?

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 86

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 66

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 87

²⁹ Krispurwana Cahyadi, *Katolik dan Politik* (Obor: Jakarta, 2006), hlm. 63

Pendidikan politik di Indonesia dirasakan sangat kurang. Ada saja cara pemerintah untuk mengekang kehendak rakyat berpolitik baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. *Flashback* politik floating mass adalah salah satu cara terbesar Orde Baru untuk memandulkan keterlibatan masyarakat dalam berpolitik.³⁰ Dengan sistem floating mass pemerintah menganggap masyarakat sebagai “bebek-bebek” yang dengan mudah diarahkan ke mana saja pemerintah mau. Floating mass mengandaikan masyarakat tidak berpolitik.

Tudingan “politik praktis” juga dikenakan pemerintah terhadap kalangan agamawan yang kritis terhadap pemerintah. Tudingan tersebut dimaksudkan untuk menghadang para ulama atau agamawan dalam memperjuangkan keadilan bagi orang kecil dan mengkritik ketidakbecusan pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.³¹

Cara-cara Orde Baru tersebut di atas membuat rakyat buta akan bermacam-macam rekayasa, dusta dan racun yang disebarkan dalam dirinya sendiri. Secara tidak sadar rakyat menghisap racun yang menyebabkan rasa benci, dendam, acuh tak acuh terhadap praktik ketidakadilan. Itu semua menyebabkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sakit. Sakit yang dialami oleh rakyat Indonesia sedemikian parahinya sehingga menimbulkan kebusukan moral.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpolitik? Dalam uraian tentang “Politik” sebelumnya yang dimaksud dengan politik adalah usaha pencapaian kesejahteraan umum. Namun banyak orang “awam” mengenai politik secara sempit sebagai permainan kotor, tipu muslihat, siasat, pergolakan, perebutan kekuasaan, dan sebagiannya yang kesemuanya tersebut rupa-rupanya bertujuan memperoleh kuasa demi kepentingan sendiri.³² Pengertian sempit seperti itu juga sering digunakan pemerintah untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak berpolitik.

Padahal secara umum “berpolitik” berarti ikut serta atau berpartisipasi dalam kehidupan politik demi tercapainya kesejahteraan umum semua warga negara. Hal itu tidak berarti kedudukan dan kekuasaan

³⁰ Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997), hlm. 19

³¹ Subu, Y. Y. (2019). Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik. *Jurnal Masalah Pastoral*, 7(1), 1–15. <https://ojs.stkyakobus.ac.id/index.php/jumpa/article/view/85>

³² Subu, Y. Y. (2019). Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik, hlm. 12

tidak berarti dalam politik. Sebagai salah satu segi hakiki dari berpolitik yang tidak mungkin dihindari adalah pencapaian, pembentukan, dan penanganan kekuasaan.³³ Dalam kaitannya dengan kekuasaan tersebut istilah berpolitik praktis sering kali dimaksudkan.

Kekuasaan adalah prasyarat agar orang dapat mempengaruhi nasib rakyat.³⁴ Namun hendaklah dilihat kekuasaan bukanlah tujuan utama. Jika kekuasaan menjadi tujuan utama maka orang akan cenderung untuk menggunakan cara-cara yang tidak sehat, tidak sesuai dengan moralitas, tidak fair play dan tidak menghargai hak-hak azasi manusia. Dalam artian politik untuk kesejahteraan masyarakat itulah setiap orang mempunyai tanggung jawab politik. Setiap orang dipanggil untuk berpartisipasi memperjuangkan terciptanya negara yang adil dan makmur.³⁵

2.3. Gereja Berpolitik?

Sampai pada saat ini Gereja terlibat langsung dalam praktik berpolitik. Gereja menggunakan kekuasaan duniawi untuk melebarkan sayap-sayapnya. Pada abad-abad tersebut merupakan malapetaka bagi warga Gereja ditinjau dari sudut penghayatan iman seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Namun syukurlah keadaan tersebut tidak berkelanjutan lebih lama lagi. Pada tahun 1870 para nasionalis Itali menghendaki terbentuknya negara kesatuan Itali dan merobohkan negara Gereja. Dengan berdirinya negara kesatuan Italia maka Gereja dibebaskan dari segala bentuk politik kekuasaan duniawi, dan mulai mencurahkan perhatiannya dalam bidang religius atau spiritual, moral, dan pendidikan.

Mungkinkah Gereja melepaskan diri dari keterlibatannya di bidang politik? Dari kasus Gereja Filipina dan El Savador rasanya tidak mungkin Gereja mampu melepaskan diri begitu saja dari dunia politik. Di El Savador, Uskup Agung Oscar Arnulfo Romero ditembak mati oleh penembak bayaran ketika sedang mempersembahkan misa (Muller, 1998).³⁶ Uskup Romero dikenal sebagai pejuang pembela rakyat tertindas. Beliau

³³ Wicaksana, P.H., (2014). Keterlibatan Kaum Awam Katolik Dalam Bidang Politik Studi Kasus di Desa Banjarsari Pada Tahun 2012-2013. *Jurnal Teologi*, 3(1), 39.

³⁴ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Kompas: Jakarta, 2003), hlm. 4

³⁵ Wicaksana, P.H., (2014). Keterlibatan Kaum Awam Katolik Dalam Bidang Politik Studi Kasus di Desa Banjarsari Pada Tahun 2012-2013, hlm. 42

³⁶ J. Muller, *Kaum Religius Sebaiknya Cuci Tangan Terhadap Politik?* (Kanisius: Yogyakarta, 1998), hlm. 74

menantang keras segala bentuk sistem masyarakat yang tidak manusiawi di negara El Salvador. Gereja El Salvador tidak bisa berpangku tangan saja melihat ribuan orang menjadi korban keganasan penguasa masa itu. Gereja El Salvador bersama dengan Gembalanya berjuang mendukung perlawanan sosial dan politis terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Pada tahun 1986, dipelopori oleh Kardinal Jaime L. Sin Gereja Filipina terlibat politik dalam bentuk Revolusi Damai (Tridiatno, 1998).³⁷ Revolusi Damai tersebut berhasil mengusir presiden Filipina pada saat itu Ferdinand Marcos. Sebagai pengganti Marcos Gereja mendukung janda mendiang Benigno Aquino, Cory Aquino naik menjadi presiden Filipina. Peristiwa tersebut kemudian dicatat sebagai peristiwa dunia yang amat monumental.

Dari dua kasus tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa Gereja tidak bisa begitu saja cuci tangan terhadap segala bentuk ketidakadilan di atas muka bumi ini. Keberadaan Gereja di dunia bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dunia. Hal ini merupakan ciri inti dari pewartaan Yesus Sang Guru sendiri adalah cinta kasih Allah yang membebaskan orang kecil dan miskin (Luk 1:51-54; 4:16-21; 6: 20-26; 7:18-23; 11:37-53; 11:46; 16:19-31). Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa, agar manusia diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Dalam hal inilah Dia menjadi Sang Pembebas. Untuk itu mau tidak mau Ia harus terjun langsung ke dalam medan perjuanganNya yaitu orang-orang menderita, hina, miskin dan berdosa.

Apakah Yesus seorang politikus? Dalam Injil memang tidak diungkapkan secara eksplisit bahwa Yesus terlibat langsung dalam politik. Jelas bahwa Yesus bukan seorang politikus. Yesus menyingkir ke gunung untuk berdoa ketika orang-orang mau memaksanya menjadi raja bagi mereka (Yoh 6:15). Yesus juga menolak pendapat Pilatus yang menyebutNya sebagai raja orang Yahudi (Yoh 18:36). Namun dari sikap dan tindakannya yang menggugat kekuasaan (Mat 23:25; Luk 11:37-46) jelaslah bercorak politis (Muller, 1996).³⁸ Sikap dan tindakan Yesus membela kaum miskin, kecil dan hina tersebut membuat pihak penguasa terganggu. Perjuangan Yesus tersebut berakhir dengan tragedi

³⁷ J. Muller, *Kaum Religius Sebaiknya Cuci Tangan Terhadap Politik?* hlm. 75

³⁸ J. Muller, *Kaum Religius Sebaiknya Cuci Tangan Terhadap Politik?* hlm. 76

penyalibanNya di Bukit Tengkorak sebagai penjahat politik. Fakta sejarah Yesus dibunuh sebagai penjahat politik tidak bisa dipungkiri.

Belajar dari Sang Guru Yesus sendiri maka tidak mungkin Gereja mengikuti Yesus tanpa harus memilih dan mencintai kaum dina, lemah dan miskin. Semakin orang Kristen meresapi Injil maka seharusnya dia semakin terdorong untuk berjuang menyejahterakan saudara-saudaranya yang hina dina, lemah dan miskin tersebut. Perjuangan Sang Guru di dunia ini mempunyai dampak politis maka para pengikutNya pun jangan pernah bisa berharap menutup mata dan diam seribu bahasa terhadap kenyataan politik yang terjadi di sekitarnya. Diam dan pura-pura tidak terlibat dalam urusan politik berarti membiarkan kebusukan-kebusukan menggerogoti keadaan masyarakat. Gereja yang diharapkan mampu menjadi “tanda dan sarana keselamatan” (LG, art. 1) akhirnya pun menjadi alat penguasa.

2.4. Peran Anggota Gereja Terlibat dalam Politik

Sejak abad ke-19 Gereja tidak lagi terlibat langsung praktik politik yang berkaitan langsung dengan kekuasaan. Sejak itu Gereja hanya memusatkan diri pada bidang pendidikan, moral, religius, dan spiritualitas. Gereja sebagai institusi tidak mempunyai kompetisi dalam bidang politik kekuasaan. Gereja yang dimaksud di sini adalah Gereja dalam arti luas: seluruh warga Gereja yang tergabung suatu persekutuan yang membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Setiap warga Gereja yang juga adalah warga negara wajib berpolitik menurut kemampuannya masing-masing dalam arti yang sejati: demi kepentingan dan kesejahteraan umum, sebagai warga negara (bdk. GS, art. 73-76).³⁹ Namun dalam praktik dilapangan keterlibatan anggota-anggota Gereja tersebut harus dibedakan antara mereka yang tertahbis dan terikat status religius dengan kaum awam.

Paus Yohanes Paulus II dengan tegas menyatakan bahwa Gereja boleh campur tangan di dalam politik dan harus menghormati otonomi bidang duniawi tersebut. Akan tetapi dalam menyatakan ini, Paus mengacu secara sangat spesifik pada partai politik dan kekuasaan sipil. Bidang-bidang inilah yang dinyatakan oleh Paus sebagai bidang-bidang yang tidak sesuai untuk dimasuki oleh mereka yang mewakili Gereja: para uskup, para

³⁹ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 73-76

biarawan-biarawati dan para petugas pastoral.⁴⁰ Dengan begitu para imam dan biarawan-biarawati dapat mengkonsentrasikan perhatiannya pada tugas pelayanan suci, yaitu: sakramen, iman, moral dan etika (bdk. LG, art. 31).⁴¹

Mereka yang tertahbis (heirarki) dan yang terikat status religius (biarawan-biarawati) harus menghindarkan diri dari komitmen politis yang menjurus pada kekuasaan. Namun mereka harus sungguh-sungguh berjuang dalam politik dalam artian mengusahakan kesejahteraan umum dengan menyerukan suara moral politik, seperti halnya: Mgr. Oscar Arnulfo Romero dan Kardinal Sin, Mgr. A. Soegijapranata, Mgr. Belo. Bahkan sangat disarankan para imam dan biarawan-biarawati mengikuti berbagai dinamika dalam dunia politik, sehingga menjadi bagian seluruh gerakan kemasyarakatan.⁴² Hal yang sangat diharapkan ialah kotbah-kotbah para pastor pada hari Minggu dapat sungguh-sungguh menanggapi keadaan masyarakat yang menderita akibat tindak ketidakadilan penguasa. Kotbah pada hari Minggu dari pastor yang mengambang dan tidak menanggapi keadaan konkret para pendengarnya hanya akan menjadi “candu bagi umat” (Muller, 1999).⁴³ Dikatakan sebagai candu karena setiap kali kotbah pastor menekankan penderitaan salib yang membius umat untuk tunduk pada bentuk-bentuk penderitaan akibat ketidakadilan. Konsili Vatikan II menegaskan peranan hirarki dalam hal ini sebagai berikut: “Sedangkan para uskup, yang dipercayai tugas untuk memimpin Gereja Allah, bersama imam-imam mereka hendaknya menyiarkan warta Kristus sedemikian rupa, sehingga semua kegiatan umat beriman di dunia dilimpahi cahaya Injil. Selain itu hendaknya semua gembala menyadari, bahwa dengan perilaku dan kesibukan-kesibukan mereka sehari-hari mereka menampilkan kepada dunia citra Gereja tersebut, yang bagi khalayak ramai menjadi pedoman untuk menilai kekuatan dan kebenaran warta kristiani” (GS, art. 43).⁴⁴

Bisa saja terjadi suatu tindakan perjuangan mengandung dua tafsiran seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Walaupun tindakan Yesus murni membela kebenaran dan keadilan namun ditafsirkan sebagai tindakan makar terhadap penguasa yang sah. Demikian pula apa yang dialami oleh Rm.

⁴⁰ Mateus Mali, *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*, hlm. 45

⁴¹ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 31

⁴² Gonggong Anhar, *Mgr. Albertus Soegijapranata Antara Gereja dan Negara* (Grasindo: Jakarta, 1993), hlm. 93

⁴³ J. Muller, *Kaum Religius Sebaiknya Cuci Tangan Terhadap Politik?* hlm. 81

⁴⁴ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 43

Mangun yang membela masyarakat Kedung Ombo dicap sebagai PKI oleh Presiden Soeharto, Mgr. Belo dituding mencampuri bidang politik praktis oleh pemerintah rezim Soeharto.⁴⁵

Heirarki tidak boleh terjun secara langsung ke dunia politik maka awamlah yang harus terlibat aktif dan sungguh-sungguh dalam politik. Hal itu kiranya menjadi tugas heirarki untuk mendorong umatnya terlibat dalam usaha membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik. Bidang politik adalah medan perjuangan kaum awam. Hal ini disebabkan karena kaum awam yang mempunyai kaitan langsung dengan hal-hal duniawi. Merekalah yang bertanggung jawab menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi dengan dijiwai semangat Injil (bdk. GS, art. 43 dan AA, art. 7). Gereja sangat mengharapkan dan menganjurkan iman para anggotanya terwujud secara duniawi. Salah satu tugas dan pekerjaan duniawi adalah berkaitan langsung dengan politik di lapangan. Di sanalah panggilan kaum awam secara khas, yaitu agar politik dijalankan demi kesejahteraan rakyat dan untuk “kesejahteraan bersama”.⁴⁶ Iman berdampak dalam bidang sosial politik melalui tindakan bertanggung jawab dari para anggota Gereja. Atau dengan kata lain tugas kaum awam untuk mencari Kerajaan Allah akan menjadi lebih konkret dengan keterlibatannya menata hal-hal duniawi termasuk politik. Maka sebenarnya wajah Gereja yang politik kiranya adalah wajah orang awam.⁴⁷ Walaupun peran hierarki dan kaum awam dalam bidang politik ada perbedaan namun perjuangan keduanya tidak terpisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Antara awam dan hierarki perlu menjalin satu kerja sama yang erat dalam perjuangan membangun dan menata dunia ini.

3. Politik dan Kerasulan Awam

Tugas perutusan Gereja dijalankan dan dilaksanakan bukan pertamanya oleh heirarki melainkan oleh seluruh umat yang tergabung dalam Gereja berkat Sakramen Baptis. Maka umat ikut berpartisipasi dalam membangun tubuh Gereja dengan mengemban lima pilar pelayanan Gereja: kerygma (pewartaan), leiturgia (ibadat), koinonia (pembangunan persatuan),

⁴⁵ Gonggong Anhar, *Mgr. Albertus Soegijapranata Antara Gereja dan Negara*, hlm. 96

⁴⁶ Benhard Kieser, *Moral Sosial* (Kanisius: Yogyakarta, 1993), hlm. 19

⁴⁷ Mateus Mali, *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*, hlm. 47

martyria (kesaksian) dan diakonia (pelayanan). Pemikiran mengenai keterlibatan kaum awam dalam pembangunan Gereja tertuang dalam LG, art. 33: “semua para awam, yang terhimpun dalam umat Allah, dan berada dalam satu Tubuh di bawah satu kepala, tanpa kecuali mereka dipanggil untuk sebagai anggota yang hidup menyumbangkan segenap tenaga yang mereka terima berkat kebaikan Sang Pencipta dan rahmat Sang Penebus demi perkembangan Gereja serta pengudusannya terus-menerus. Dengan baptis dan penguatan, semua orang ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk kerasulan itu.”⁴⁸

Kemudian dalam dekret tentang kerasulan awam (Apostolicam Actuositatem) AA, art. 2 disebutkan: “Gereja diciptakan untuk menyebarluaskan Kerajaan Kristus di mana-mana demi kemuliaan Allah Bapa, dan dengan demikian mengikutsertakan semua orang dalam penebusan yang membawa keselamatan, dan supaya melalui mereka seluruh dunia sungguh-sungguh diserahkan kepada Kristus. Semua kegiatan Tubuh Mistik, yang mengarah kepada tujuan itu, disebut kerasulan. Kerasulan itu dilaksanakan oleh Gereja melalui semua anggotanya, dengan pelbagai cara.” Kata kerasulan mencakup setiap kegiatan Tubuh Mistik Kristus. Kegiatan yang mengarah kepada tujuan Gereja untukewartakan keselamatan yang diterima dari Kristus, apapun bentuknya, disebut kerasulan.

Dari dua artikel tersebut di atas menjadi jelaslah kiranya bahwa kerasulan awam itu bukan kegiatan di sekitar gedung gereja, dalam lingkungan paroki atau organisasi Katolik, atau sebagai pembantu pastor. Itu semua penting namun sebenarnya hal tersebut tadi tidak termasuk sebagai hakikat kerasulan awam. Hakikat kerasulan awam adalah partisipasi kaum awam dalam panggilan seluruh Gereja untukewartakan Kabar Gembira dan menghadirkan Kerajaan Allah dalam dunia.⁴⁹

Panggilan kerasulan tersebut bukan atas kehendak sendiri, melainkan dari perutusan dan kesatuannya dengan Kristus sebagai kepala. Kesatuan dengan Kristus sebagai kepala inilah merupakan dasar kerasulan awam selain perutusannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kerasulan awam itu merupakan suatu implikasi dari hidup dalam kesatuan dalam Kristus dan kesatuannya dengan BapaNya (bdk. Yoh 17:21). Hal ini ditekankan dalam dekret tentang kerasulan awam AA, art. 3: “Kaum awam

⁴⁸ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 33

⁴⁹ B.A. Pareira, *Nabi dan Politik* (Dioma: Malang, 1987), hlm. 36

menerima tugas serta haknya untuk merasul berdasarkan persatuan mereka dengan Kristus Kepala. Sebab melalui baptis mereka disaturagakan dengan tubuh Mistik Kristus, melalui penguatan mereka diteguhkan oleh kekuatan Roh Kudus, dan dengan demikian oleh Tuhan sendiri ditetapkan untuk merasul.”

Hakikat politik adalah demi terwujudnya kesetaraan umum melalui kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu keterlibatan kaum awam dalam bidang politik demi terciptanya kesejahteraan umum adalah merupakan panggilan kerasulan. Perjuangan politik adalah salah satu bentuk dari usahaewartakan Kabar Gembira dan menghadirkan Kerajaan Allah.⁵⁰ Bukankah itu merupakan misi kerasulan kaum awam sebagai murid Kristus? Dengan perjuangan itu, kaum awam meneruskan karya Yesus, yang memperjuangkan kesejahteraan seluruh umat manusia dari zaman ke zaman. Jika demikian, kehadiran orang Katolik di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam akan semakin tidak dilihat sebagai ancaman “kristenisasi”. Komitmen pada tujuan perjuangan yang sama, kehadiran mereka kaum Muslim semakin tidak dilihat sebagai ancaman “Islamisasi”. Hal demikian juga ditegaskan dalam dokumen Konsili Vatikan II, GS, art. 75: “Hendaknya segenap umat Kristen menyadari panggilan mereka yang khas dalam negara. Di situlah terpancar teladan mereka, yang terikat oleh kesadaran dan kewajiban mereka mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum yang memang perlu ditingkatkan.”

Karya kerasulan tidak menuntut suatu jabatan tinggi atau jabatan pimpinan. Akan tetapi secara umum sebagai kelompok minoritas bagi umat Katolik kesempatan untuk menduduki posisi pimpinan itu semakin kecil, apalagi yang bersifat politik. Namun demikian seperti orang-orang lain, orang-orang Katolik harus mempunyai kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk itu, dan siap manakala diperlukan. Akan tetapi sebagai kelompok kecil, umat Katolik harus dapat menawarkan kualitas lebih dari pada kuantitas.

Dalam setiap usaha mewujudkan kesejahteraan umum tidak ada satu tindakan pun yang bersifat netral. Maka umat Katolik tidak bisa tinggal diam dan netral dalam menghadapi ketidakadilan dan penyimpangan perilaku politik dewasa ini. Umat Katolik walau minoritas tetap harus

⁵⁰ B.A. Pareira, *Nabi dan Politik*, hlm. 37

berusaha untuk menciptakan kesejahteraan umum. Usaha menciptakan kesejahteraan umum itu berdimensi etis. Dimensi etis politik adalah tanggung jawab anggota Gereja atas cara-cara dan arah pencapaian tujuan tersebut.⁵¹

4. Etika Berpolitik Kristiani

Salah satu konsekuensi berpolitik praktis adalah kekuasaan. Kekuasaan tersebut adalah sebagai prasyarat untuk memperjuangkan nasib masyarakat. Karena dekat dengan kekuasaan besar godaannya untuk mencintai kekuasaan sebagai pamrih pribadi. Maka untuk menghindari pamrih pribadi warga Gereja yang terlibat langsung dalam dunia politik memerlukan suatu tolok ukur. Tolok ukur itu adalah nilai-nilai kristiani tentang bagaimana hidup bersama agar sesuai dengan martabatnya sebagai anak Allah.⁵²

Sebagai dasar tolok ukur tingkah laku berpolitik sudah barang tentu adalah demi kesejahteraan umum. Namun untuk sampai pada kesejahteraan umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Pertama, menghargai hak-hak asasi manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Hak-hak asasi manusia pada dasarnya adalah universal karena itu tidak ada perbedaan suku, agama, ras dan golongan, jenis kelamin. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Sang Penciptanya, Allah (bdk. GS, art. 12).⁵³

Kedua, tidak menghalalkan segala cara. Dalam teologi moral dikenal satu prinsip: apa yang baik tidak boleh keluar dari yang buruk. Karena itu berpolitik yang baik harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang luhur (bdk. GS, art. 16). Ketiga, bekerja sama dengan semua pihak yang sama-sama mempunyai kehendak baik yaitu demi memajukan kesejahteraan umum. Memperjuangkan kesejahteraan umum bukanlah monopoli orang Katolik. Kesejahteraan umum adalah masalah universal, siapa saja memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat mengusahakannya (bdk. GS, art. 26 dan 75). Keempat, semangat pengabdian kepada sesama adalah memandang

⁵¹ Arung, M. Palaga & Yuwanto. (2021). Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(4), hlm. 205

⁵² Subu, Y. Y. (2019). Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik, hlm. 13

⁵³ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965), art. 12

orang lain dalam semangat kesamaan martabat, memandang sesama sebagai saudara (bdk. GS, art. 27). Kelima, memihak kaum dina, lemah dan miskin yang kerap kali hak asasinya diabaikan oleh penguasa.

5. Awam Politis dan Tugas Kritis-Profetis

Keterlibatan Gereja dan para anggotanya terutama kaum awam dalam bidang politik dengan berpegang teguh pada tujuan utama, yaitu demi kesejahteraan umum berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Seperti menghargai hak-hak asasi manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Hak-hak asasi manusia pada dasarnya adalah universal karena itu tidak ada perbedaan suku, agama, ras dan golongan, jenis kelamin. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Sang Penciptanya (bdk. GS, art. 12). Bekerja sama dengan semua pihak yang sama-sama mempunyai kehendak baik yaitu demi memajukan kesejahteraan umum. memperjuangkan kesejahteraan umum bukanlah monopoli orang Katolik. Kesejahteraan umum adalah masalah universal, siapa saja memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat mengusahakannya (bdk. GS, art. 26 dan 75). Hal ini bisa disebut sebagai tugas profetis (kenabian). Disebut sebagai tugas profetis karena mau meneladani para nabi seperti Elia, Amos, Mikha, Yesaya, Yeremia dan banyak lagi yang tergabung dalam nabi-nabi awali dan klasik yang secara aktif mengambil bagian dalam dunia politik.⁵⁴ Mereka adalah politikus-politikus sejati.

Para nabi tersebut sering kali harus berhadapan dengan raja yang tidak senantiasa menerima beritanya dengan senang hati. Namun, watak kenabian justru semakin menjadi jelas dan nampak ketika nabi harus berhadapan dengan kekuasaan yang menentangnya. Seorang nabi akan selalu siap untuk menghadapi kemungkinan penolakan terhadap beritanya yang berarti penolakan terhadap kewibawaannya sebagai seorang nabi. Penolakan tersebut bisa saja berakhir dengan pemenjaraan sang nabi tersebut seperti terjadi dalam kasus nabi Mikha yang dipenjara oleh raja Ahab (1 Raj 22:27), nabi Yeremia dipenjara dan dimasukkan ke dalam perigi oleh raja Zedekia (Yer 37:11). Nabi Elia karena tidak disukai oleh raja maka

⁵⁴ B.A. Pareira, *Nabi dan Politik*, hlm. 40

hidupnya ada dalam ancaman bahaya (1 Raj 19) dan lebih parah lagi teman-teman Elia yang mati terbunuh (bdk. Mt 23:30-31).⁵⁵

Dari pengalaman para nabi tersebut maka dapatlah dikatakan nabi adalah tokoh yang berani mengingatkan bahkan sampai menentang kekuasaan demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Usaha menegakkan kebenaran dan keadilan itu selalu hanya bertentangan dengan pihak penguasa.⁵⁶ Kadang kala untuk menegakkan kebenaran seorang nabi harus bertentangan dengan orang banyak seperti yang terjadi pada Yeremia. Ketika raja dan orang banyak menghendaki kerja sama dengan Mesir untuk menghantam Babel, Yeremia justru menganjurkan untuk menyerahkan diri kepada Babel (Yer 27). Menurutnnya lebih baik hidup dijajah dari pada hancur. Pendapat Yeremia ini dirasakan sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat manusia.

Peringatan Yeremia mendapat perlawanan keras dari nabi-nabi lain terutama nabi Hananya (Yer 28:1-17). Dalam Kitab Suci tidak ditulis bagaimana cerita selanjutnya. Hanya saja dalam bab ke-29 dari Yerusalem, Yeremia mengirimkan surat kepada orang-orang buangan di Babel. Agaknya Israel tidak mengindahkan perkataan Yeremia. Seharusnya Israel menyerah saja kepada Babel karena bangsa tersebut terlalu kuat bagi Israel. Tetapi karena perlawanan Israel, tentara Babel terpancing untuk melampiaskan kebuasannya dan menghancurkan Israel. Yeremia ingin mengubah arah sejarah tetapi Israel menghendaki lain. Karena sejarah bangsa Israel seharusnya mengikuti logika. Namun sayang manusia dengan logikanya tidak dapat melihat dan mengetahui rencana Allah. Sedangkan sumber pandangan para nabi berasal dari Tuhan. Mereka mempunyai penglihatan kenabian, penglihatan untuk mengetahui rencana Allah.

Pertentangan dengan penguasa dan massa janganlah dilihat sebagai kriteria kenabian. Tidak demikian cara berpikir yang seharusnya tentang kenabian. Tidak selalu seorang nabi bertentangan dengan raja dan massa. Pertentangan tersebut hendaknya dilihat sebagai risiko. Sebuah risiko dari keengganan nabi untuk mengikuti dan mempertahankan "status quo". Sejalan dengan itu masih ada banyak risiko lainnya: terasing dari lingkungannya, tidak dapat menikmati keamanan hidup dan mungkin juga

⁵⁵ B.A. Pareira, *Nabi dan Politik*, hlm. 43

⁵⁶ B.A. Pareira, *Nabi dan Politik*, hlm. 45

nyawa sebagai taruhannya.⁵⁷ Risiko-risiko tersebut mau tidak mau harus diterima oleh seorang yang berkarakter kenabian dari dulu hingga sekarang ini dan kapan pun juga.

6. Kapan Satu Pendapat dan Kapan Bebas

Bertitik tolak dari maksud dan tujuan Gereja di dunia, mengacu pada LG, art. 1, maka mau tidak mau Gereja harus terlibat dalam politik. Seperti telah dikatakan dalam poin sebelumnya bahwa Gereja yang dimaksudkan di sini adalah Gereja dalam arti luas, terutama kaum awamnya. Keterlibatan mereka itu bukanlah atas nama Gereja. Setiap anggota Gereja terlibat dalam bidang politik atas nama pribadi dan dengan tanggung jawab sendiri (bdk. GS, art. 76). Namun demikian tindakan-tindakan mereka harus memancarkan ajaran Sang Guru Sejati yaitu Yesus Kristus sendiri: keterlibatan setiap warga Gereja dalam politik harus bebas dari pamrih pribadi, jujur dan berdedikasi pada masyarakat dan negara, dan keterlibatan mereka dibimbing oleh cahaya Ilahi.⁵⁸

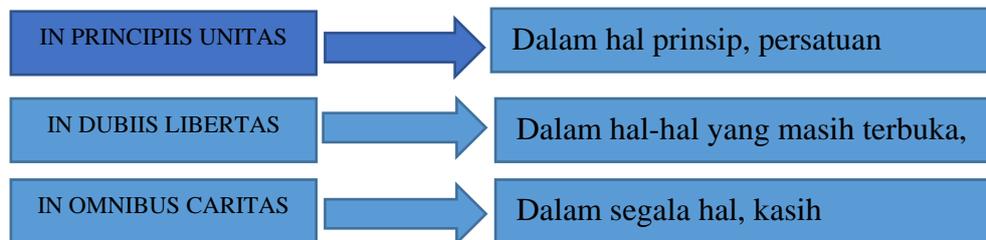
Sekarang kita melihat kenyataannya. Kenyataan iklim hidup bersama di negara Indonesia sampai saat ini sudah sangat diracuni oleh kedusataan dan bermacam-macam rekayasa yang teselubung maupun yang terang-terangan. Banyak pihak melakukan politik kotor. Di tengah kebuasan tersebut warga Katolik yang terpanggil sebagai nabi zaman ini tidak boleh ikut nakal dan kotor. Hal itu memang tidak mudah karena kemungkinan besar mereka akan tersingkir oleh lingkungannya. Namun, sebagai nabi dan pengikut Kristus warga Gereja harus yakin bahwa sikap cinta kasih yang diperteguh dengan harapan harus tetap diamalkan secara nalar sehat dan beriman. Sikap politik warga Kristiani selalu harus bersih, teguh dalam prinsip tapi penuh cinta kasih dan nalar yang sehat.

Dalam hal keikutsertaan dalam bidang politik, warga Gereja bebas untuk memilih jalan strategis serta taktik-taktik politik yang ia yakini. Asal saja cara-cara yang ia tempuh harus berdasarkan rambu-rambu moral, etika, sopan santun berpolitik dan fair play yang dilandasi dengan Pancasila. Pancasila, bagi komunitas politik Indonesia tentulah merupakan penjelaman dan penjabaran dari nilai-nilai moral, etika, sopan santun dan fair play sikap

⁵⁷ B.A. Pareira, *Nabi dan Politik*, hlm. 49

⁵⁸ Subu, Y. Y. (2019). *Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik*, hlm. 14

dan perbuatan politik.⁵⁹ Hal itu bisa dikatakan juga bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak juga merupakan pengejawantahan nilai-nilai Kristiani walaupun politik yang dapat mengklaim diri berciri Kristiani tidak ada monopolinya. Pedoman yang harus ditekankan di sini adalah sikap seperti yang berulang kali ditekankan oleh Mgr. Soegijapranata: *in principiis unitas* (dalam hal prinsip, persatuan), *in dubiis libertas* (dalam hal-hal yang masih terbuka, kebebasan) dan *in omnibus caritas* (dalam segala hal, kasih).⁶⁰



Satu hal yang harus disadari betul oleh warga Gereja, politik warga Kristiani bukanlah dimaksudkan untuk mengembangkan sayap Gereja. Saat ini ekspansionisme dan prosetisme sudah bukan waktunya lagi bagi Gereja. Hal sangat ditekankan sekali oleh Mgr. Soegijapranata pada masanya, “Tugas orang Katolik itu bukan membaptis orang. Itu tugas Roh Kudus. Tugas orang Katolik adalah bagaimana membuat baik negara dan bangsa Indonesia”.⁶¹ Kata-kata profetis Mgr. Soegijapranata tersebut sampai saat ini masih berlaku. Keterlibatan kaum awam dalam politik adalah demi negara dan negeri Indonesia menjadi baik, adil, makmur, manusiawi dan beradap. Karena itu warga Gereja perlu bekerja sama dengan semua orang yang berkhendak baik.

7. Pembagian Horizontal Secara Dinamis

Dalam hal berpolitik kiranya naif sekali kalau warga Gereja berpikiran primordial sempit dan sektarian. Politik warga kristiani tidak membuat pembagian-pembagian vertikal suku, etnik, agama dan lain-lain.⁶²

⁵⁹ Subu, Y. Y. (2019). Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik, hlm. 15

⁶⁰ Anhar Gonggong, *Mgr. Albertus Soegijapranata Antara Gereja dan Negara*, hlm. 70

⁶¹ Anhar Gonggong, *Mgr. Albertus Soegijapranata Antara Gereja dan Negara*, hlm. 72

⁶² Subu, Y. Y. (2019). Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik, hlm. 16

Hal yang perlu dibuat dan diperhatikan adalah pembagian-pembagian yang horisontal antara baik dan buruk, bermoral dan tidak bermoral, pendukung Kerajaan Tuhan dan bukan pendukung kerajaan tuan.⁶³ Dengan kata lain pembagian secara horisontal ini dalam negara Indonesia lebih tepat kalau dikatakan pembagian antara pro dan anti Pancasila. Paradigma yang seperti itulah yang memungkinkan terjadinya suatu bentuk kerja sama antar warga Gereja dengan kelompok agama yang lain yang mengarah kepada persaudaraan sejati.

Pembagian horisontal ini tentulah tidak mungkin jelas dan pasti seperti hitam dan putih. Banyak sekali permasalahan yang masih dalam keragu-raguan dan dilema-dilema yang sulit. Karena itu umat kristiani harus selalu mengasah dan melatih hati nurani. Lewat hati nurani yang bersih dan jernih orang akan dapat membedakan hal-hal mana saja yang hakiki, prinsipal, mana yang memerlukan satu sikap dan satu bahasa. Apabila dalam membahas hal-hal yang prinsipial pun masih terjadi perbedaan, maka dialog atau *brainstorming* perlu sekali.

Dialog dalam politik hati nurani sangat diperlukan. Lewat dialog tersebut setiap orang dapat menyumbang dan mengasah pikiran, ide, gagasan, dan sanggahan. Dalam proses dialog tersebut pendapat seseorang akan berbenturan dengan pendapat-pendapat orang lain. Maka sangat diharapkan adanya sikap menghargai dan membutuhkan tesis orang lain dalam dialog, demi tercapainya suatu kesimpulan yang lebih benar dari pendapat sebelumnya.

8. Tugas Generasi Muda Katolik dalam Bidang Politik

Gereja bertanggung jawab terhadap terciptanya kesejahteraan umum melalui segala tugas dan pekerjaan duniawi, termasuk diantaranya adalah bidang politik. Keikutsertaan warga Gereja berkiprah dalam politik adalah merupakan kesadaran bahwa politik menyangkut kepentingan masyarakat luas.⁶⁴ Kaum muda Katolik adalah bagian keanggotaan warga Gereja dan merupakan angkatan penerus bangsa dan Gereja kaum muda mempunyai peran yang sangat penting di masa yang akan datang. Karenanya kaum muda Gereja tidak luput dari peran sertanya untuk terlibat dalam dunia

⁶³ Subu, Y. Y. (2019). Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik, hlm. 16

⁶⁴ Yohanes Maryono, (2012). Keterlibatan Gereja Katolik Indonesia Dalam Bidang Politik, hlm 13

politik sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anggota Gereja. Agar kaum muda dapat berkiprah dalam dunia politik secara aktif dan efektif maka mereka harus dipersiapkan secara intensif. “Hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda, supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara” (GS, art. 75).⁶⁵

Salah satu bentuk pembinaan ini adalah dengan cara kaderisasi politik pada generasi mudanya. Kaderisasi ini dapat dilakukan dengan program khusus atau dengan melibatkan kaum muda dalam gerakan-gerakan demi kepentingan rakyat kebanyakan. Bagaimana bentuk dan isi kaderisasi tersebut memang harus dipikirkan lagi lebih lanjut. Tapi yang jelas tujuan dari kaderisasi tersebut antara lain adalah membentuk manusia seutuhnya yang mempunyai keberanian, kreativitas dan berwawasan kebangsaan. Manusia yang berwawasan luas dan dalam mengenai dinamika kehidupan politik di tanah air yang berpihak kepada kaum kecil, hina dina dan lemah.

Manusia yang berpikiran kritis dan keratif serta integritas kepribadian untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi lewat diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok tersebut terjadi proses dialektika. Lewat dialektika tersebut diharapkan orang akan dapat mendekati kebenaran atau paling tidak mencapai yang lebih baik dan benar. Manusia yang partisipatif dan proaktif dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi bersama dengan golongan agama lain demi persatuan bangsa Indonesia. Kerja sama antar kelompok beragama perlu dibangun sejak dini lewat generasi mudanya.

SIMPULAN

Urgensitas dari artikel ini, penulis melihat perlu adanya kerja sama antara hierarki dengan umat Katolik dalam keterlibatan mereka di bidang politik. Dalam konteks Indonesia saat ini tidak dapat disangkal bahwa peranan hierarki masih sangat besar. Maka hendaknya pihak hierarki giat mendorong umatnya untuk terlibat dalam politik demi terwujudnya kesejahteraan umum. Para gembala umat lebih dulu menggugah hati

⁶⁵ Yohanes Maryono, (2012). Keterlibatan Gereja Katolik Indonesia Dalam Bidang Politik, hlm. 14

umatnya agar menyadari panggilan mereka di dunia sebagai garam dan terang dunia.

Khusus dalam konteks masyarakat Indonesia yang saat ini sedang mengalami masa paling kritis dalam sejarah hidupnya para Uskup seluruh Indonesia mengajak segenap umatnya untuk tidak menjahui keterlibatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang politik. Umat katolik wajib turut berusaha mempengaruhi tata politik berdasarkan hukum, supaya hak-hak pribadi dalam kehidupan umum lebih dilindungi, misalnya hak untuk dengan bebas mengadakan pertemuan dan mendirikan organisasi, hak untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya sendiri, dan untuk mengamalkan agama sebagai perorangan maupun di muka umum. Sebab terjaminnya hak-hak pribadi merupakan syarat mutlak, supaya para warga negara, masing-masing maupun secara kolektif dapat berperan serta secara aktif dalam kehidupan dan pemerintahan negara.

Politik merupakan bidang yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Politik merupakan kunci sukses peletakan landasan bagi persyaratan tercapainya pengembangan martabat pribadi manusia melalui berbagai struktur pemenuhan fasilitas kehidupan umum. Bidang politik bisa menjadi sarana Gereja mewujudkan imannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Antara Gereja dan politik tidak ada kaitannya secara langsung namun begitu juga politik bukan suatu bidang yang harus di jauhi. Justru iman mempunyai dimensi politik. Keterlibatan Gereja dalam bidang politik adalah bagian integral dari tugas perutusannya di dunia.

Referensi

- Arung, M. Palaga & Yuwanto. (2021). Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(4), 196-215.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta, 1996.
- Budiman, Arief. *Teori Negara*. Gramedia: Jakarta, 1996.
- Cahyadi, Krispurwana. *Katolik dan Politik*, Obor: Jakarta, 2006.
- Creswell, J. W. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed (Translated by Fawaid, A, Trans)*. Celeban Timur,

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Creswell, J.W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan Edisi Ketiga. Terjemahan Dari Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Darung, A., & Yuda, Y. (2021). Keterlibatan Gereja Katolik Mendukung Moderasi Beragama Berorientasi Pada Komitmen Kebangsaan. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 5(2), 84-97.
- Dopo, Eduard R. *Keprihatinan Sosial Gereja*. Kanisius: Yogyakarta, 1992.
- Dulles, Avery. *Model-Model Gereja*. Nusa Indah: Ende, 1990.
- Gaudium et Spes*. (1965). Terj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Go, Piet. *Etos dan Moralitas Politik*. Kanisius: Yogyakarta, 2004.
- Go Piet. *Peran Serta Orang Katolik dalam Politik*. Dioma: Malang, 1990.
- Gonggong, Anhar. *Mgr. Albertus Soegijapranata Antara Gereja dan Negara*. Grasindo: Jakarta, 1993.
- Haris, Syamsudin. *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Gramedia: Jakarta, 1996.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas: Jakarta, 2003.
- Imawan, Riswanda. *Membedah Politik Orde Baru*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997.
- Kelen, Donatus Sarmada. (2018). Gereja Katolik Indonesia di Tengah Pusaran Politik Kekuasaan dan Tantangannya Ke Depan. *Studia Philosophica et Theologica*, 18(2), 97-118.
- Kieser, Benhard. *Moral Sosial*. Kanisius: Yogyakarta, 1993.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. (2016). Dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2021). *Dokumen Konsili Vatikan II Christus Dominus Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja*. Perterj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
- Lumen Gentium*. (1992). Terj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Mali, Mateus. *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*. Kanisius: Yogyakarta,

2014.

- Maryono, Yohanes. (2012). Keterlibatan Gereja Katolik Indonesia Dalam Bidang Politik. *Jurnal Teologi*, 1(2), 103-120.
- Omyair, Marius. (2022). Partisipasi Gereja Katolik Dalam Reformasi Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Logos*, 2(1), 33-40.
- Pareira, B.A. *Nabi dan Politik*. Dioma: Malang, 1987.
- Subu, Y. Y. (2019). Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik. *Jurnal Masalah Pastoral*, 7(1), 1-15.
<https://ojs.stkyakobus.ac.id/index.php/jumpa/article/view/85>
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta, 1992.
- Wicaksana, P.H. (2014). Keterlibatan Kaum Awam Katolik Dalam Bidang Politik Studi Kasus di Desa Banjarsari Pada Tahun 2012-2013. *Jurnal Teologi*, 3(1), 37-49.
- Wijaya, Y. (2018). Kepemimpinan Yesus Sebagai Acuan Bagi Kepemimpinan Gereja Masa Kini. *Jurnal Jaffray*, 16(2), 129.
<https://doi.org/10.25278/jj71.v16i2.287>